

**LAPORAN PENUTUPAN RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI KERJA SAMA
TEKNI LUAR NEGERI LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH
Hotel Pangeran Beach Padang, 12 September 2019**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Syukur alhamdulillah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, telah sampai di penghujung acara.

Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber dan peserta dari pemerintah daerah yang telah berkontribusi dan partisipasi aktifnya pada rapat pada hari ini.

Bapak/Ibu sekalian, dari kegiatan pada hari ini sekiranya diperoleh rekomendasi-rekomendasi yang dapat kami sampaikan:

1. Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat sebagai salah satu langkah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan harus saling menguntungkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
2. Pelaksanaan kerja sama luar negeri diharapkan tidak sekedar menjadi rutinitas administratif, namun diarahkan sebagai pemicu inovasi, khususnya di daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Selain itu, pemerintah daerah harus teliti dalam mengidentifikasi potensi, manfaat dan dampak kedepan melalui pemetaan dan kajian kerja sama.
3. Kementerian Dalam Negeri akan senantiasa mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan terkait kerja sama luar negeri dengan kementerian/lembaga teknis terkait di pusat, guna mendukung pelaksanaan kerja sama luar negeri yang efektif dan efisien.
4. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai peluang kerja sama yang ditawarkan oleh pihak luar negeri, salah satunya adalah lembaga luar negeri seperti *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan daya ungkit percepatan pembangunan di daerah, serta meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
5. Bagi pemerintah daerah yang sudah melakukan penandatanganan naskah kerja sama dengan lembaga luar negeri: untuk status LoI segera meningkatkan statusnya menjadi MoU, sedangkan yang sudah mempunyai MoU wajib untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam MoU tersebut.

6. Pemerintah Daerah agar mampu melakukan self-evaluation terhadap kerja sama yang ada di daerahnya masing-masing, yang dapat menjadi dasar bagi Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi kerja sama.
7. Pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan lembaga luar negeri dilaksanakan dengan mekanisme komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antara perangkat daerah, dan pemerintah daerah dengan mitra luar negeri.
8. Pemerintah daerah agar melaporkan hasil kerja sama dengan lembaga luar negeri secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri.

Dengan kegiatan semacam ini, kami berharap dapat menjadi forum bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas dan kinerja pelaksanaan program-program kerja sama pemerintah daerah dengan luar negeri khususnya lembaga luar negeri, sehingga kedepannya setiap kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah dengan lembaga luar negeri dapat berjalan efektif dan efisien, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi proses pemerataan pembangunan di daerah.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta dan semua pihak yang telah berpartisipasi dari awal hingga berakhirnya kegiatan ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb